

POPULISME AGAMA ERA DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh : Venti Wijayanti

(Menyelesaikan studi Filsafat di Fakultas Filsafat
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Abstract

Populism as a phenomenon is developing in countries throughout the world. The failure of democracy as a system of government is a major factor in the emergence of populism. Indonesia has only stepped on 20 years of the reign of democracy, religious populism has emerged in fertile fields. The elections of 2016 and 2019 became a phenomenon of the great success of populism in Indonesia. Religious populism can be created because there are three main constituent elements, namely: the people, the elite, the public will. Religious populism arises because ideology can give symbolic legitimacy to control public space. In the face of challenges, the social, global economy comes in the middle, religious populism provides promises of certainty and motivation. The existence of information media that positions everyone can be a source of information about lies so that social polarization appears. Religious populism responds to the political status quo and economic of democratic era in Indonesia.

Keywords: *Religious populism, Indonesian democracy, Symbolic legitimacy, Social polarization*

1. Pendahuluan

Populisme berkembang di seluruh dunia dengan berbagai macam fenomena politik. Populisme diketahui sebagai bentuk gerakan masa besar yang terkait dengan bentuk keberpihakan terhadap rezim tertentu. Gejala populisme besar-besaran terjadi di banyak belahan dunia, yang dimulai pada akhir abad ke 19 di Rusia dan Amerika. Kekuatan masa tersebut terbentuk dengan adanya aktor populis yang berhaluan kanan atau kiri, konservatif atau progresif, religious atau sekuler (Mudde, 2017: 21). Fenomena modern ini dapat dilacak pada bentuk demokrasi yang

terjadi di Amerika, Eropa, maupun di Indonesia. Gelombang besar adanya populisme yang membahayakan terjadi di Amerika, dengan fakta bahwa Donald Trump memakai isu rasisme sayap kanan. Begitu juga yang terjadi di Perancis terdapat Le Pen Marie yang berhalauan sayap kanan yang mengusung sikap anti imigran dan anti Uni Eropa. Di Belanda, ada Geert Wilders merupakan politisi sayap kanan anti Islam. Di Indonesia dengan adanya fenomena Aksi Bela Islam, sampai terjadi Gerakan 212 yang berhasil menggalang masa ribuan berbasis kepercayaan pada ranah religiusitas.

Kemunculan populismeterkait dengan adanya kegagalan sistem pemerintahan demokrasi sebagai ideologi maupun sebagai rezim. Dampak populisme kerap kali bergulir mempengaruhi loyalitas masa yang dipegaruhi oleh media yang pertumbuhannya seporadis. Media mengusung jurnalisme yang dapat meningkatkan intoleransi masyarakat kelas menengah dengan menyebarkan konten negatif. Isi jurnalisme dimainkan oleh golongan elite tertentu yang memaksimalkan penyebarannya melalui kanal media masa maupun kanal grup private. Tanpa adanya verifikasi sumber berita yang akurat untuk mencari tahu kredibilitas informasi berita yang tersebar. Aktor yang berkerja dengan menyasar isu sensitif terkait tujuan tertentu memainkannya bisa menggunakan buzzer yang melibatkan masyarakat. Posisi kelas menengah sebagai golongan yang memiliki jumlah masa mayoritas dengan kapabilitas tertentu, memainkannya dengan menyasar trending untuk menjadi headlines. Gejala ini sangat populer digunakan pada pergantian ke masa revolusi era digital 4.0.

Populisme yang menjadi gelombang besar fenomena politik dunia, memiliki beberapa pemaknaan dari gejala tersebut. Populisme sebagai jenis wacana politik, ideologi, kepemimpinan, gerakan, fenomena, strategi, bentuk, gejala, dan lain-lain (Mudde, 2017). Pada akhir 1960-an, populisme muncul dalam perdebatan tentang dekolonisasi, spekulasi tentang masa depan kaum tani, dan pada awal abad 21 terdapat diskusi tentang Komunisme, khususnya paham Mao. Saat ini, khususnya di Eropa semua keawatiran dan sedikit harapan di dunia mengkrystal dengan populisme. Di samping itu secara sistematis, liberalism sama kawatirnya tentang adanya masa liberalism jatuh ke dalam populisme, nasionalisme, dan juga xenophobia, yang merupakan pemahaman tentang demokrasi, dilain pihak dilihat sebagai teknokrasi liberal, bentuk sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab. Di Amerika, populisme sebagian besar masih terkait dengan ide politik sayap kiri yang memiliki potensi berkonflik dengan partai Demokratis (Müller, 2016: 7 – 8).

2. Populisme sebagai Fenomena Global

Fenomena Populisme dibelahan dunia dipegaruhi oleh adanya gelombang besar isu rasisme yang dipakai elite untuk kepentingan merebut kekuasaan. Per-

mainan politis ini selalu menggunakan logika oposisi biner yang menempatkan dua hal berlawanan, antara benar atau salah secara empiris. Sehingga dapat secara cepat ditentukan pilihannya akan sebuah pandangan politik. Populisme muncul karena adanya konteks demokrasi liberal. Hal ini ditunjukkan secara empiris dan dalam sebuah teori politik daripada sebagai ideologi. Secara teoretis, populisme secara fundamental disandingkan dengan demokrasi liberal daripada demokrasi semata atau model demokrasi lainnya. Secara empiris, sebagian besar aktor populis yang relevan memobilisasi dalam kerangka demokrasi liberal, yaitu sistem yang bercita-cita atau bercita – cita menjadi demokrasi liberal. Meskipun fokus ini khusus, dan jelas membatasi, itu berarti bahwa kami tidak menganggap demokrasi liberal tanpa cacat, atau sistem demokrasi alternatif apa pun menurut definisi tidak demokratis, juga tidak menerapkan pendekatan hanya dalam kerangka demokrasi liberal. Populisme dalam konteks Eropa sering merujuk pada anti imigrasi dan xenophobia, sedangkan di Amerika Latin sering meyinggung *clientelism* dan kesalahan pengaturan ekonomi. Fakta populisme yang membingungkan, tidak adanya klaim dari individu atau organisasi. Biasanya berasal dari orang lain yang sering berkonotasi negatif, contohnya seperti presiden Argentina Juan Domingo Perón atau politisi Belanda yang terbunuh Pim Fortuyn, tidak mengidentifikasi diri sebagai populis. Karena populisme tidak dapat mengklaim teks yang menentukan atau kasus khas proto, akademisi dan jurnalis menggunakan istilah ini untuk menunjukkan fenomena yang sangat beragam (Mudde, 2017: 1 – 2).

Populisme menurut Rosanvallon merupakan fenomena politik dari kegagalan fungsi demokrasi (Rosanvallon, 2019: 40). Kegagalan demokrasi disebabkan oleh tuduhan para politisi yang duduk di pemerintahan terhadap mereka yang mengkritiknya adalah tidak menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Hal ini seperti bentuk perjuangan membela rakyat karena kedaulatannya disita oleh elite yang korup dan tidak peka terhadap kebutuhan atau kepentingan rakyat. Membela rakyat untuk melawan demokrasi representatif yang tidak lagi aspiratif bagi yang diwakil, sehingga dicurigai sebagai bentuk demagogi. Sebuah teori demokrasi harus mengusulkan kerangka kerja analitis untuk memahami kecurangan yang terkait dengan rezim yang menggambarkan diri mereka sebagai seorang demokratis. Jika sejarah demokrasi disusun dari banyak kecurangan, itu juga tidak dapat dipisahkan dari patologi demokrasi. Mereka membentuk citra demokrasi itu sendiri yang cacat, komitmen hanya sementara, membuat lebih buruk, atau citra yang sepenuhnya bertolak belakang membentuk interpretasi minimalis atau yang berkembang secara radikal. Tetapi mereka selalu terlihat dari klaim yang mewujudkan kebenaran demokrasi. Patologi ini adalah hipotesis Pierre Rosanvallon yang selalu dapat dipahami sebagai pengurangan, polarisasi, atau penyederhanaan dari bentuk ketegangan dan bentuk ketidakpastian yang mendukung demokrasi (Martinsen, 2019: 35).

Rosanvallon mengidentifikasi potensi populisme dari Jean-Marie Le Pen

yang diuntungkan pada tahun 1988 dan yang juga membuka jalan bagi partai-partai populis sayap kanan saat ini seperti German AfD atau Front National, di bawah kepemimpinan Marine Le Pen. Konsistensi antara karakteristik yang menekankan bagaimana populisme “selalu anti-institusional, anti-elitis, atau anti-sistemik” dan hubungan antara kelemahan laten demokrasi dan momen populis dengan cepat menjadi dapat dikenali: populisme memberikan ekspresi pada kegagalan demokrasi dalam bentuk kritik terhadap elite dan institusi politik, tuduhan korupsi, dan bereaksi terhadapnya dengan menyerukan demokrasi yang lebih langsung. Ini mirip dengan kritik umum terhadap sistem politik pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, momen populis pertama muncul, dalam bentuk sebagian besar gerakan populis pertanian seperti Narodniki di Rusia atau Partai Rakyat di Amerika Serikat. Gerakan-gerakan ini dapat dipahami sebagai reaksi terhadap transformasi masyarakat modern dan terlebih lagi, sebagai reaksi terhadap krisis representasi dalam demokrasi (Martinsen, 2019: 45 – 46).

Populisme memiliki tiga konsep inti, yaitu: adanya rakyat, para elite, kehendak umum (Mudde, 2017: 9). Ketiga hal ini yang mempengaruhi berlangsungnya populisme. Rakyat merupakan konstruksi yang bisa langsung menunjuk ke hal yang spesifik dari kenyataan. Laclau berpendapat bahwa sebenarnya bahwa rakyat adalah penanda kosong yang membuat populisme menjadi ideologi dan fenomena politik yang kuat. Keberadaan rakyat dapat diposisikan sebagai perwakilan yang dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, dengan menghasilkan identitas Bersama antara kelompok yang berbeda dan memfasilitasi dukungan mereka untuk tujuan bersama. Rakyat juga merupakan konstruksi yang memungkinkan fleksibilitas, yang dimaknai sebagai penguasa, sebagai rakyat biasa, dan sebagai bangsa. Gagasan rakyat sebagai berdaulat didasarkan pada gagasan demokrasi modern yang mendefinisikan rakyat tidak hanya sebagai sumber utama kekuatan politik, tetapi juga sebagai penguasa. Sehingga perlu diketahui bahwa keberadaan rakyat dalam populisme sebagai sumber kekuatan politik utama, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan mobilisasi besar – besaran berujung pada pemberontakan. Rakyat juga dapat dipahami sebagai konsep kelas yang menggabungkan status sosial ekonomi pada tradisi budaya tertentu dan nilai – nilai sosial yang dipertahankan. Konsep rakyat sebagai bangsa didefinisikan sebagai kewarganegaraan atau etnis, sehingga muncul pemahaman bahwa batas negara sebagai bentuk yang sama sekali tidak sederhana (Mudde, 2017: 9).

Elite memiliki posisi atas dasar kekuasaan, yang memegang peran dalam politik, ekonomi, media, dan seni. Posisi elite pada umumnya tidak menyatakan diri sebagai populis, tetapi memposisikan dirinya untuk bersimpati kepada populis. Para elite mengabaikan hal utama dari pendefinisian antara rakyat dan elite yang bersifat moral dan bukan situasional, dan merupakan strategi pemimpin populis. Misalnya mantan perdana menteri Slovakia Vladimir Mečiar hingga mendiang presiden Venezuela Hugo Chávez yang berkuasa telah mampu mempertahankan

an retorika anti kemapanan mereka dengan sebagian mendefinisikan ulang elite. Yang penting bagi argumen mereka adalah bahwa kekuatan nyata, tidak terletak pada para pemimpin yang terpilih secara demokratis, yaitu, populis, tetapi dengan beberapa kekuatan bayangan yang terus berpegang pada kekuatan tidak sah untuk merongrong suara rakyat. Di sinilah “gaya politik paranoid,” seperti yang dikatakan sejarawan progresif Amerika Richard Hofstadter yang terkenal tentang populisme, yang paling jelas muncul ke permukaan. Populisme dapat digabungkan dengan nasionalisme, ketika perbedaan antara rakyat dan elite adalah moral dan etnis. Aktor populis menggunakan berbagai kriteria lainnya untuk membedakan antara rakyat dan elite. Ini memberi mereka fleksibilitas yang sangat penting ketika populis memperoleh kekuatan politik berdasarkan kelas sosial, etnis, dan moralitas (Mudde, 2017: 14).

Konsep inti ketiga dan terakhir dari ideologi populis adalah gagasan kehendak umum. mengacu pada kapasitas orang untuk bergabung bersama ke dalam komunitas dan membuat undang-undang untuk menegakkan kepentingan mereka bersama, yang kedua menunjukkan jumlah sederhana dari kepentingan tertentu pada periode waktu tertentu. Perbedaan populis dan moral antara rakyat dan elite korup memperkuat gagasan bahwa adanya ide umum tentang populisme. Dalam populisme, proses rasional dibangun melalui ruang publik, gagasan kehendak umum berdasarkan pada akal sehat. Hal ini jika dibingkai dengan cara tertentu bisa menggabungkan tuntutan yang berbeda dan mengidentifikasi musuh bersama (Mudde, 2017: 18).

Hal penting yang dapat diketahui dari populisme adalah tentang daya tarik dari populisme. Keberhasilan populisme dapat dihubungkan dengan apa yang orang sebut sebagai janji-janji demokrasi yang belum terpenuhi dan dalam arti tertentu tidak dapat dipenuhi dalam masyarakat kita. Mereka lebih seperti apa yang kadang-kadang disebut teori demokrasi rakyat, atau intuisi yang menjelaskan tidak hanya daya tarik demokrasi dalam kata modern tetapi juga kegagalan yang berkala. Janji penting adalah bahwa rakyat dapat memerintah. Setidaknya dalam teori, populis mengklaim bahwa rakyat secara keseluruhan tidak hanya memiliki kehendak yang sama dan koheren tetapi juga dapat memerintah dalam arti bahwa perwakilan yang tepat dapat melaksanakan apa yang dituntut masyarakat dalam bentuk perintah mendesak. Banyak pemahaman tentang demokrasi dapat diterjemahkan ke dalam gambaran seperti itu: demokrasi adalah pemerintahan tersendiri, dan siapa yang dapat memerintah idealnya bukan hanya mayoritas tetapi keseluruhan. Bahkan di Athena yang demokratis, cerita ini bukanlah keseluruhan cerita, tetapi Athena yang bisa dibayangkan tentang demokrasi adalah kapasitas mengumpulkan kolektif dan yang sebenarnya adalah terlibat dalam aksi bersama. Yang terpenting, pada pemahaman bahwa warga negara akan memerintah dan diperintah secara bergantian, tidak ada demokrasi tanpa pergantian yang tepat, baik masuk dan keluar dari jabatan publik. Populis berbicara seolah-olah janji tersebut dapat

dipenuhi. Populisme hanya masuk akal dalam konteks demokrasi representatif (Müller, 2016: 76 – 77).

3. Populisme Agama di Indonesia dan Permasalahannya

Gerakan Aksi Bela Islam di Indonesia yang terjadi pada tahun 2016 merupakan bentuk populisme agama yang mengusung isu rasisme. Berawal dari ucapan Ahok, Gubernur Jakarta saat itu tentang surat Al-Maidah ayat 51 sebagai kebohongan. Surat Al-Maidah ayat 51 berisi bahwa kaum Muslim wajib memilih pemimpin Muslim, bukan berasal dari kaum non-Muslim. Hal ini diucapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, yang juga pada saat Ahok dalam rangka kampanye Pilkada DKI. Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi saat video disebar di Bani Yani di kanal media online YouTube dan Facebook. Indonesia yang merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga dengan adanya video tersebut, kalangan umat muslim menganggap bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama. Sampai terbit pernyataan sikap dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan hal tersebut. Kemudian isu ini berlanjut, dengan munculnya Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI dipimpin oleh Bachtiar Nasir. Organisasi Islam lainnya membaca peristiwa ini sebagai momentum, Front Pembela Islam dipimpin oleh Rizieq Shihab juga bergabung untuk menaikkan isu ini menjadi kendaraan politiknya. Mayoritas masyarakat menerima video atau informasi viral serta banyaknya berita tersebut tanpa mempertanyakan kredibilitas sumbernya. Dampak yang ditimbulkan tingginya intoleransi pada masyarakat dominan, sehingga bisa memicu fenomena totalitarianisme.

Peristiwa ini juga terkait dengan kepentingan elite politik untuk persiapan Pilkada DKI Jakarta yang mengusung rasisme agama melalui gerakan Aksi Bela Islam. Gelombang Aksi Bela Islam yang dikomando oleh Forum Pembela Islam bermula pada aksi 14 Oktober 2016, 28 Oktober 2016, 4 Oktober 2016, 2 Desember 2016 (212), 11 Februari 2017, 21 Februari 2017 (212 jilid 2), 31 Maret 2017, dan 5 Mei 2017. Pilkada DKI terjadi dua putaran, putaran pertama pada 15 Februari 2017 dengan 3 calon diantaranya nomor 1. Agus Harimurti bersama wakilnya Sylviana Murni, nomor 2. Basuki Tjahaja Purnama bersama wakilnya Djarot Saiful Hidayat, nomor 3. Anis Baswedan bersama wakilnya Sandiaga Uno. Pada putaran ke-dua dilaksanakan pada 19 April 2017 dengan 2 calon yang lolos putaran pertama, yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan. Dimenangkan oleh pasangan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, yang dipercaya masyarakat DKI menjabat sampai sekarang.

Populisme agama di Indonesia terlihat jelas dengan adanya fenomena yang terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017. Populisme agama dapat mengagalkan Basu-

ki Tjahaja Purnama (Ahok) meneruskan jabatan Gubernur DKI di Pilkada 2017, Ahok divonis bersalah pada hasil proses pengadilan kasus melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama pada 9 Mei 2017. Ahok harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Gerakan 212 bisa dilihat sebagai bentuk momentum keberhasilan bagi elite politik yang memainkan populisme agama, dengan menebarkan isu rasisme besar-besaran melalui kanal online maupun offline. Pertemuan-pertemuan offline banyak dilakukan oleh kegiatan keseharian melalui pertemuan keagamaan di rumah warga, seperti pengajian dan arisan perkumpulan keagamaan.

Fenomena populisme agama di Indonesia tidak hanya pada Aksi Bela Islam pada Gerakan 212. Pada Pemilu Presiden 2019 juga menggunakan pendekatan populisme agama. Kandidat Pemilu 2019 adalah pasangan Calon Presiden nomor 1. Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin, dan pasangan nomor 2. Prabowo Subianto dan wakilnya Sandiaga Uno. Keberhasilan Pilkada DKI 2017, menjadi studi politik kaum elite untuk mengkopi pendekatan populisme agama di arena politik untuk Pemilu Presiden 2019. Jelas bisa dilihat bahwa pendekatan agama masih dipakai untuk menggalang masa umat Muslim Indonesia dengan memainkan narasi memperjuangkan kepentingan umat Muslim yang selama ini diabaikan oleh Negara. Strategi elite memainkan agenda politik menggunakan populisme agama berhasil juga pada Pemilu Presiden 2019, karena menggalang suara mayoritas dalam hal ini adalah agama Islam. Suara umat Islam diakomodasi dari berbagai lintas kelas dan lintas profesi yang memiliki sifat konservatif dan anti-pluralis.

Populisme agama mirip dengan gerakan pra-totaliter dalam dua aspek. Pertama, semacam bendera bagi perjuangan untuk membela orang-orang dengan alasan bahwa kedaulatan rakyat disita oleh elite korup yang tidak peka terhadap kepentingan rakyat. Biasanya, para kritikus dan juga ditujukan kepada para demagog yang haus akan kekuasaan: perilaku mereka sama ketika berkuasa, tetapi untuk mendapatkan simpati mereka perlu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat (Haryatmoko, 2019: 71).

Kedua, populisme baik dalam menggunakan demografi dan retorika. Mereka tahu persis inti dari komunikasi adalah mengarahkan pengaruh melalui manipulasi. Mereka selalu berusaha menemukan cara bagaimana prasangka negatif dapat diintensifkan dengan memanipulasi emosi orang untuk tujuan fragmentasi. Demagog memberikan suara mereka kepada rakyat. Karakteristik mereka adalah sebagai berikut. Pertama, mereka dapat menyesuaikan diri dengan situasi emosional rakyat dengan menunjukkan berbagai wajah sebanyak kategori sosial orang. Kedua, prinsip mereka adalah "meyakinkan berarti harga mati untuk bisa membuat kebohongan seperti kenyataan". Ketiga, mereka bersedia menyentuh emosi orang-orang dengan menomorduakan fakta dan objektivitas atau rasio. Demagog bersedia merekayasa emosi kolektif dengan menghubungkan krisis dengan traumatisme massal dengan menempatkan diri mereka sebagai korban ketidakadilan

atau objek penghinaan. Hal ini efektif untuk meningkatkan kebencian. Selain itu, para demagog pandai menggunakan metafora yang berakar pada budaya, sejarah, dan agama mayoritas yang dapat menggerakkan emosi (Haryatmoko, 2019: 72).

Ketiga, populisme agama, menurut Georg Betz dan Carol Johnson menawarkan program yang tampaknya menarik, yaitu mengklaim memiliki jawaban atas tiga masalah. Pertama, apa yang salah atau tidak benar dalam masyarakat? Kedua, siapa yang salah? Dan ketiga, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi? Namun, wacana populis cenderung meningkatkan ketegangan dan permusuhan karena intinya adalah merebut kekuasaan. Akan lebih berbahaya bila agama dijadikan modal sosial dalam upaya ini. Mengapa populisme religius memikat? (Haryatmoko, 2019: 72).

Populisme agama meningkat jumlahnya disebabkan oleh fungsi dari populisme agama sebagai ideologi yang memberi legitimasi simbolik untuk mengendalikan ruang publik. Kesuksesan populisme agama bisa menjawab segala bentuk ketidakpastian ekonomi global, permasalahan ketidakadilan pelanggaran HAM, pengangguran, dan banyaknya problem sosial ekonomi. Sehingga dapat memberi kepastian dalam ketidakpastian yang ditawarkan. Populisme agama menjanjikan keadilan ekonomi dan menjanjikan persaudaraan melalui revolusi moral yang perkembangannya kian signifikan. Keyakinan masyarakat semakin terjamin dengan adanya kepastian identitas tertentu, karena tidak hanya memberi kepastian tetapi menawarkan jaminan atas dasar keyakinan. Bukan hanya sekedar analisa dari akumulatif fenomena sosial yang ada. Agama menjanjikan stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir, dan etos. Agama tidak hanya memberikan janji tetapi juga menjamin meskipun tidak didasarkan pada analisis karena hanya didasarkan pada keyakinan. Keyakinan ini memberi kepastian.

Agama menduduki posisi utama, sehingga umatnya merasakan keyakinan dan mendapatkan motivasi. Hal ini didasari oleh beberapa hal yang mendasar. Pertama, agama memberi identitas yang dapat dibuktikan dengan bentuk representasi diri. Aktualisasi diri ini diyakinkan oleh adanya bentuk kepemilikan sosial yang diberikan pada kalangan tertentu untuk stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara hidup dan etos. Bentuk tawaran ini diperlukan pada era demokrasi sekarang. Kedua, agama menumbuhkan keyakinan bahwa orang berada dalam kontak dengan makna terdalam hidupnya. Ketiga, berkaitan dengan acuan tujuan terakhir hidup dengan memberi pembenaran dan menghindari sikap kritis terhadap tatanan yang ditolaknya. Berdasarkan poin-poin positif dari agama, para politisi demagog secara licik memanipulasi agama untuk menawarkan imajinasi kolektif baru untuk menggantikan imajinasi yang terkena krisis.

Kekuatan retorika imajiner adalah kemampuannya untuk mengubah kegelisahan kolektif menjadi ketakutan terhadap musuh yang berbahaya. Upaya untuk menyalurkan kegelisahan kepada musuh (kambing hitam) sudah menjawab traumatisme karena retorika yang bersifat sementara dapat menjelaskan dari mana

ancaman itu berasal. Karenanya, kebencian tumbuh. Itu dibuahi oleh militan untuk menciptakan keinginan untuk menghancurkan semua hambatan imajiner baru. Dengan menghancurkan pihak lain (kambing hitam), perasaan menjadi berkuasa diperbarui (Haryatmoko, 2010: 96). Kambing hitam tersebut dilabeli sebagai “pihak asing”. Ingatan terhadap sejarah sebagai retorika imaginari sosial, meskipun tidak jelas, memberikan daya tarik emosional. Dengan menawarkan mitos-mitos semacam itu, massa termotivasi untuk melakukan kekerasan demi melindungi ideologi mereka karena fakta objektif kurang berpengaruh daripada emosi.

Rekayasa populisme agama yang mirip dengan mekanisme anti-Semit Pan-Germanic adalah tuduhan dan propaganda luas bahwa pihak asing (bukan bagian dari rakyat kita) adalah sumber masalah dan krisis saat ini. Populisme serupa dalam mengadopsi strategi totaliter, menyalahkan “kambing hitam” untuk menyatukan massa menjadi target emosi sosial yang dihasilkan dari perbedaan ekonomi dan produksi kebohongan besar, terencana, direkayasa, dan tersebar luas (Haryatmoko, 2019: 72).

Kebohongan memiliki dampak kuat dalam menciptakan kebijakan publik: mereka menghancurkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Kebohongan menggeser argumen ke masalah yang tidak relevan dan menunda proses pembuatan hukum selama bertahun-tahun sampai argumen dapat diselesaikan secara ilmiah. Kebohongan memecah kelompok-kelompok sosial dan melemahkan budaya politik sehingga konsensus ideologis menjadi tidak mungkin. Warga negara biasa, bahkan kaum intelektual, tidak mampu menentang kebohongan yang terorganisir dengan baik. Tidak jarang akademisi direkrut untuk memberikan legitimasi ilmiah kepada rekayasa kebohongan mereka. Seberapa canggih kerjasama dan kepentingan ideologis dalam memanipulasi media untuk menciptakan situasi di mana kebenaran tidak dapat ditemukan. Lebih tepatnya, masalah kebenaran tidak lagi relevan.

Kebohongan sengaja dibuat, dikembangkan, diperkenalkan, dan direkayasa untuk wacana publik sebagai bagian dari koordinasi strategis untuk menyembunyikan kebenaran. Sehingga dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan bersama dengan menciptakan konflik yang pada awalnya tidak ada. Hal ini sampai menghancurkan cita – cita ideal demokrasi, dengan melarang para penguasa peduli terhadap kepentingan rakyat karena adanya konspirasi antara industri, media, pakar oportunistik, dan para pemikir licik. Mereka melakukan kebohongan dibuat sebagai mendukung bentuk fisik dari banyak kalangan yang dibayar terutama untuk memanipulasi kebijakan publik. Mereka tahu persis bahwa kebohongan yang tertata dengan baik adalah hambatan yang efektif untuk menghentikan kebijakan politik tertentu. Kebohongan lebih destruktif daripada lobi untuk menghentikan tagihan atau pencalonan pemilu daerah. Tujuan strategisnya adalah menghentikan solusi untuk masalah yang mereka lawan demi uang atau ideologi. Itulah sebabnya kebohongan, propaganda dan pembunuhan karakter selalu digunakan sebagai alat

persuasi massa, yang merupakan bagian dari kesamaan antara nasionalisme etnis dan populisme agama (Haryatmoko, 2019: 73).

4. Penutup

Demokrasi dan populisme adalah konsep yang kompleks. Demokrasi menekankan pentingnya transparansi, kebebasan sipil, supermasi hukum, akuntabilitas horizontal, dan hak – hak minoritas. Demokrasi elektoral yang juga dijalankan di Pemilu Indonesia yang dilaksanakan secara teratur, bebas, dan adil, harus menajdmin beberapa hak dasar masyarakat sipil dan hak politik warga negara. Kebebasan bagi minoritas tidak dapat diganggu gugat, harus dihormati hak – haknya dan mendapat perlindungan hukum. Populisme bertolak belakang dari ide dasar demokrasi, sehingga keduanya dapat dimaknai sebagai bentuk hubungan kausalitas.

Permasalahan populisme agama di Indonesia pada contoh kasus yang terjadi pada saat Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Agama menjadi penyatu karena memiliki tujuan yang sama. Posisi media dalam populisme agama berubah secara signifikan, karena adanya komunikasi digital yang memposisikan semua orang bisa menjadi sumber informasi menyebarkan kebohongan. Akibatnya, dalam masyarakat Indonesia memiliki ideologi yang terpolarisasi, mengakibatkan ketegangan dan konflik yang dapat dipicu dengan mudah. Lebih buruk lagi, kebohongan menyuburkan polarisasi sosial lebih jauh karena mereka memperkuat keyakinan/ideologi masing-masing kelompok. Setiap kelompok cenderung menolak segala bentuk analisis yang berbeda meskipun masuk akal dan objektif. Kebohongan menyuburkan ideologi.

The Post-Truth menurut J.A. Llorente (2017) adalah “iklim sosial-politik di mana objektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat berpihak pada keyakinan meskipun sebenarnya fakta menunjukkan sesuatu yang berbeda”. Ada enam hal baru yang menandai era Post-Truth: (1) akses luas ke konten informasi karena digitalisasi komunikasi, (2) kemungkinan orang menghasilkan informasi melalui media sosial; (3) demokratisasi media dan jurnalisme yang memungkinkan kompensasi warga atas ketidakpuasan publik terhadap informasi media massa dan kekecewaan terhadap politik; (4) kecenderungan orang yang lebih besar untuk menerima informasi yang salah karena pengembangan komunitas ideologi yang sama dengan keyakinan yang sama; (5) teknologi pengganggu kebenaran karena hal yang viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika, dan (6) tidak adanya pemalsuan atau penyangkalan kebenaran tetapi kebenaran bukanlah yang paling penting. Orang bahkan tidak menggunakan istilah “dusta” dan “tipuan” tetapi “kebenaran alternatif”(Haryatmoko, 2019: 75).

Indonesia menjadi lahan basah untuk berkembangnya populisme agama

dengan karakteristik yang mendorong keberlangsungannya. Hal ini disebabkan oleh kegagalan bentuk demokrasi pemerintahan, yang juga menyalahi Pancasila sebagai bentuk dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Populisme agama merespon status quo politik dan ekonomi dengan mengintroduksi sentimen dan emosional dengan pesan palsu yang memiliki sifat tendensius. Dampak keberlanjutan dari populisme agama adalah munculnya ekstrimisme politik yang menciptakan dunia menjadi dua dengan tidak adanya sikap tanggung jawab moral terhadap pihak lain, yang diciptakan hanya kewajiban etis terhadap anggota kelompoknya. Sehingga memunculkan jenis baru penghambaan. Cara untuk menanggulangi dampak populisme adalah dengan cara melakukan pembaharuan sistem atau regulasi bentuk Pemilu. Hal yang dapat terlebih dahulu adalah perombakan kebijakan Partai Politik dan sistem regulasi yang tepat untuk para calon legislatif, pembaharuan ekosistem institusi pemerintahan, memaksimalkan politik demokrasi warga negara, dan adanya evaluasi transparan.

Daftar Pustaka

- Haryatmoko, 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Keekrasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Haryatmoko, Johannes, 2019. *The Pathology of Tribal Nationalism According To Hannah Arendt Uncovering Religious Populism Mechanisms Which Jeopardize Cultural Diversity*, Jurnal Kawistara Volume 9 No. 1, 22 April 2019, Halaman 60 – 77 <https://doi.org/10.22146/kawistara.40876>
- Kaltwasser, Cristobal Rovira, *The Oxford Handbook of Populism*, 2017, United Kingdom: Oxford University Press
- Martisen, Oliver Flugel., Franziska Martinsen, Stephen W. Sawyer, Daniel Schulz (eds.). 2019. *Pierre Rosanvallon's Political Thought, Interdisciplinary Approaches*, Bielefeld University Press
- Mudde, Cas and Cristobal Rovira Kaltwasser, *Populism A Very Short Introduction*, 2017, Oxford University Press
- Müller, Jan-Werner, 2016. *What Is Populism?*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press